

KAJIAN DAMPAK SOSIO EKONOMI PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK LOKAL DI PROVINSI RIAU

Rizqi Sari Anggraini¹ dan Ali Jamil²

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau¹

Jalan Kaharuddin Nst No. 341, Pekanbaru

E-mail : bptp_riau@yahoo.com.au

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara²

Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 1B, Medan

E-mail: bptp-sumut@litbang.deptan.go.id

ABSTRACT

One of the economic growth bases in Riau province is agriculture, which involves the majority of the population. Unfortunately, Riau Province as world biodiversity center shifts into the region's most aggressive culling genetic resources. This study aims to determine the socio-economic impact of conservation efforts related to Local Genetic Resources in Riau Province. The method used is descriptive and Library Study. Based on the analysis carried out can be deduced The preservation of Genetic Resources Activities in Riau province can not be separated from efforts to organize local government sustainable development, competitiveness and achieve a sustainable environment. Though not give adequate results for the control and prevention of damage and environmental degradation, but it may be noted has made various efforts towards the realization of a better environmental quality in Riau Province. Some efforts towards a sustainable environment, among others, implemented through the management of land use and water use planning; controlling pollution to water bodies; increase awareness and participation of local communities and businesses to protecting the environment, as well as institutional capacity building for environmental management.

Keywords: Socio-economic impact assessment, local genetic resources, Riau.

ABSTRAK

Salah satu basis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau adalah sektor pertanian, yang melibatkan mayoritas penduduk. Satu hal yang cukup disayangkan, Provinsi Riau sebagai pusat keragaman hayati dunia bergeser menjadi wilayah yang paling agresif pemusnahan Sumber Daya Genetiknya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosio ekonomi terkait usaha pelestarian Sumber Daya Genetik Lokal di Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan study perpustakaan. Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan Kegiatan pelestarian Sumber Daya Genetik di Provinsi Riau tidak lepas dari usaha pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing dan mewujudkan lingkungan yang lestari. Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Provinsi Riau. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: Kajian dampak sosio ekonomi, sumber daya genetik lokal, Riau.

PENDAHULUAN

Mengacu pada amanat Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan dengan otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian, paradigma pembangunan ekonomi yang dianut sekarang bergeser menjadi desentralistis (*bottom-up*) mengakomodir usulan daerah yang digabungkan dengan kepentingan pusat (*top-down policy*). Pemberian otonomi ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan perubahan paradigma ini diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh lebih cepat dan benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal.

Di Propinsi Riau, salah satu basis dari pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor pertanian, yang melibatkan mayoritas penduduk. Untuk menggali semua potensi yang dimiliki tersebut, Pemerintah Propinsi Riau menetapkan kebijakan pembangunan daerah dengan visi *“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamais, Sejahtera, Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020”*. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi yang berintikan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan prasarana pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat, sesuai dukungan sumber daya wilayah.

Budianto (1999) berasumsi bahwa usaha pembangunan di bidang pertanian ditujukan terutama untuk mewujudkan konsep ketahanan pangan dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan menurut J. Napitu (2008), sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya alam hayati khususnya nabati. Banyak faktor yang mempengaruhi produksi pertanian termasuk lingkungan alam. Oleh sebab itu kebijakan sektor pertanian harus benar-benar diperhatikan dan hati hati untuk mengacu kelestarian hasil yang akan datang. Manfaat pengembangan budi daya tanaman untuk menghasilkan jenis unggul guna meningkatkan hasil tanaman sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan serta kesehatan dan kebutuhan industri dalam negeri. Manfaat tersebut akan memberikan peningkatan pendapatan dan peningkatan taraf hidup petani serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan kerja.

Satu hal yang cukup disayangkan, Provinsi Riau yang mendapatkan julukan pusat keagaman hayati dunia bergeser menjadi wilayah yang paling agresif pemusnahan Sumber Daya Genetiknya. Arus pembangunan menuntut pembukaan wilayah secara besar-besaran baik untuk pemukiman maupun untuk perkebunan. Semua itu terkadang dilakukan tanpa mempertimbangkan kelestarian kekayaan hayati yang merupakan asset ilmu pengetahuan dan investasi yang sangat prospektif untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Kajian Dampak Sosio Ekonomi terkait dengan Pelestarian Sumber Daya Genetik Lokal di Provinsi Riau ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosio ekonomi terkait usaha pelestarian Sumber Daya Genetik Lokal di Provinsi Riau, mengingat kegiatan eksplorasi lahan terkadang diperlukan namun diharapkan tidak sampai mengikis kekayaan Sumber Daya Genetik

wilayah tersebut, sehingga pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan pertanian pada khususnya dapat berjalan selaras dengan alam dan berkelanjutan.

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH RIAU

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi 01⁰ 05'00" Lintang Selatan-02⁰25'00" Lintang Utara dan 100⁰00'00"-105⁰05'00 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Riau setelah dimekarkan tercatat 107.932,71 km², dimana 80,11% diantaranya merupakan wilayah daratan sedangkan 19,89% diantaranya lautan/perairan. Menurut kondisi geomorfologinya daratan Riau dapat dibedakan antara wilayah bagian Timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter d.p.l; wilayah bagian Tengah merupakan dataran bergelombang; dan wilayah bagian Barat merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menepatkan wilayah Riau bagian Timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur, 4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan, yakni sungai Siak dengan panjang +300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang +400 Km dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman +6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang +500 Km dengan kedalaman 6-8 meter. Wilayah Riau bagian Timur yang merupakan dataran rendah menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala.

Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang berbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecendrungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian Timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.

Kondisi geologi Riau didominasi oleh bantuan sedimen Kuartar dengan sisipan bantuan sedimen Tersier di bagian Barat dan Selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian Barat sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone). Kemungkinan terjadi gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan volkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali di sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau selain berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga memberikan tantangan bagi pemerintahan Provinsi untuk memiliki lingkungan hidup yang lestari. Dalam konteks tersebut, maka keberadaan instansi yang secara khusus membidangi lingkungan hidup; peran serta seluruh satuan kerja, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan; serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan pengendalian

kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Riau (Pemprov. Riau, 2009).

Demografi

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 mencatat jumlah penduduk Provinsi Riau sebesar 3.755.485 jiwa dengan distribusi 56,7% tinggal di perkotaan dan 43,3% bermukim di pedesaan. Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat jumlah penduduk tahun 2005 meningkat menjadi 4.614.930 jiwa. Jumlah Penduduk Provinsi Riau pada tahun 2006 adalah 6.369.600 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung stabil dengan rata-rata 4,01 persen per tahun yang sangat dipengaruhi oleh migrasi masuk. Jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat dikurangi, maka pada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi akan menjadi sekitar 12 juta orang, atau bertambah sekitar 34 persen dari tahun 2006.

Fenomena distribusi kependudukan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat penduduk pedesaan. Gejala tersebut selain disebabkan oleh perubahan kawasan pedesaan menjadi perkotaan secara fisik dan fungsional, juga memberikan indikasi bahwasanya kebijakan pembangunan selama itu lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Di samping itu, industrialisasi telah memacu pembangunan fasilitas secara fisik maupun non fisik pada beberapa kawasan yang mengubah rona fisik pedesaan menjadi perkotaan.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecenderungannya pada dasarnya didukung oleh sumber daya alam (*resources base economy*) yang dimiliki seperti perkebunan, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan energi. Dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut, maka pengelolaan yang efektif dan efisien akan memperkuat struktur perekonomian Provinsi Riau. Disamping hal tersebut Kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan juga menjadi penting bagi perkembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, pertambangan dan jasa kelautan seperti kepelabuhanan dan lainnya. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa migas yang cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 8,28% per tahun selama periode tahun 2000-2004 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dan cenderung meningkat. LPE dengan migas dengan LPE tanpa migas memiliki kecenderungan yang serupa, namun dengan laju lebih rendah karena laju pertumbuhan sektor pertambangan sangat rendah, yaitu 1,27% per tahun. LPE Provinsi Riau tanpa migas lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Jika pada tahun 2003 LPE Provinsi Riau tercatat sebesar 8,17% tahun 2005 sebesar 8,54% dan tahun 2006 sebesar 8,66%; LPE Nasional mencatat 5,69% pada tahun 2003, 6,48% pada tahun 2005, dan 6,04% pada tahun 2006.
2. Struktur perekonomian dengan migas selama periode 2003-2005 didominasi oleh sektor pertambangan, yaitu rata-rata sebesar 41-44%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,70% dan sektor industri pengolahan sebesar 20,06% pada tahun 2005. Struktur perekonomian tanpa migas didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 38,17% pada tahun

2005, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,86% dan sektor perdagangan dan jasa sebesar 11,54% Sektor pertanian dibentuk oleh sub-sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

3. Pada tahun 2003 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas tercatat sebesar Rp 6,40 juta, tahun 2004 sebesar Rp 6,83 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp. 7,60 juta; sedangkan migas pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp16,50 juta, tahun 2004 sebesar Rp 16,64 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp 17,50 juta. Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2003 sebesar Rp 5,85 juta; sedangkan tahun 2004 sebesar Rp 6,25 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp 6,64 juta; sedang dengan migas tahun 2003 sebesar Rp 15,09 juta, tahun 2004 sebesar Rp15,21 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp 15,71 juta.
4. Neraca perdangan luar negeri dengan migas selama periode 2003-2005 menunjukkan posisi surplus, karena nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Laju perkembangan perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi yang berkepanjangan antara tahun 2000-2005 ditandai pertumbuhan positif dan negative secara bergantian. Pada tahun 2005 tercatat pertumbuhan impor hingga 162,61% disebabkan oleh permintaan migas domestik yang cenderung meningkat. Pada tahun 2003 kegiatan ekspor-impor masih dilakukan melalui Batam dan Bintan, di samping pelabuhan Dumai, Buatan, Sungai pakning, Perawang, Pekanbaru, dan Kuala Enok. Komoditi dengan nilai ekspor tertinggi adalah minyak bumi, crude palm oil, pulp and paper, crumb rubber, kertas dan barang dari kertas, minyak kelapa/kelapa, kayu lapis, dan kayu olahan, Tumbuhnya industri pengelolaan minyak sawit menjadi bahan setengah jadi (CPO) telah meningkatkan nilai ekspor.
5. Perkembangan investasi selama tahun 2000-2005 relatif belum stabil dan berfluktuasi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan investasi rata-rata selama periode 2000-2005 adalah sebesar 4,56%. Peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau nyatanya cukup signifikan, yakni sebesar 25,12%. Realisasi investasi PMDN pada tahun 2006 meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun 2005, sedang PMA hingga sepuluh kali lebih besar. Distribusi investasi. PMDN menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hulu merupakan wilayah yang memiliki nilai investasi terbesar. Sedang nilai realisasi PMA terbesar berada pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai.
6. Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkat pendapatan asli Daerah Riau dan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti Perdagangan, Industri, Jasa, Investasi, dan membuka kesempatan kerja.
7. Terbukanya pasar domestik dan regional bagi produk hortikultura telah mendorong perkembangan sektor transportasi dan kesempatan usaha lain.

ISU-ISU STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025, dicantumkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Potensi terjadinya banjir dan genangan disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu, dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat

yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai.

2. Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Riau. Pembukaan hutan untuk fungsi lainnya yang beragam berlangsung secara berangsur-angsur dan tercatat seluas 72.299 Ha pada tahun 2004. Alih fungsi lahan hutan antara lain dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri perkayuan, permukiman, perladangan, dan perambahan hutan yang terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan upaya konservasi. Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir oleh berkurangnya daerah resapan air dan perubahan tutupan lahan di daerah tangkapan air, juga menimbulkan kerusakan badan sungai secara fisik berupa longsor dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkar-muat bahan dan produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur sungai efektif yang dapat dilayari; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai; dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan oleh semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya luas lahan yang tidak diusahakan dan terbentuknya padang rumput. Catatan pada Balai Pengelolaan DAS Indragiri-Rokan menunjukkan hutan tanaman industri (HTI), dan pertanian lahan kering dalam DAS Siak menjadi semakin luas.
3. Keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari.
4. Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit (PKS), crumb rubber, plywood pulp dan kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Indikasi penurunan kualitas air sungai oleh sumber-sumber domestik dan industri antara lain ditunjukkan oleh pencemaran pada Sungai Siak, dimana konsentrasi beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, DO, minyak dan lemak tercatat telah melampaui baku mutu serta beban limbah yang besar yang dibuang oleh industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan ke Sungai Siak. Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK dan kota-kota yang berlokasi di bagian tengah DAS menggunakan-nya sebagai air baku penyediaan air bersih.

5. Kerusakan fisik badan sungai yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan konsentrasi TSS dan TDS oleh abrasi dan longsor tebing sungai yang disebabkan alih fungsi lahan dalam DAS maupun kegiatan bongkar-muat bahan baku dan produk industri di tepi sungai telah mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan transportasi sungai yang menjadi salah satu moda transportasi penting di Provinsi Riau. Transportasi sungai melayani kebutuhan pergerakan barang dan penumpang antara wilayah hulu menuju pusat-pusat perkotaan di wilayah tengah dan hilir.
6. Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang terbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian Timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.
7. Kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang banyak jumlahnya merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Provinsi Riau pada jangka panjang. Kawasan pesisir dan perairan laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk biota-biota yang dilindungi. Sebagai muara lima belas sungai yang mengalir ke pantai Timur, maka kawasan pesisir dan laut kaya akan sumber daya perikanan. Demikian pula halnya pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil nyatanya juga merupakan tempat bermukim para nelayan yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil pada jangka panjang perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan dan keanekaragaman biota yang perlu dilindungi.
8. Permasalahan lingkungan yang dihadapi Provinsi Riau sejak beberapa tahun terakhir dan berlangsung secara berkala adalah dampak kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Provinsi Riau, bahkan negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan melakukan pembersihan lahan untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal. Dari luasan hutan terbakar yang berhasil dipadamkan pada tahun 2004 seluas 164,5 Ha dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 744 Ha memberikan indikasi bahwasanya hutan yang terbakar menjadi semakin luas. Walaupun belum terdapat perhitungan yang pasti tentang kerugian akibat kebakaran hutan tersebut, namun dapat dipastikan telah mengganggu aktivitas ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya, keanekaragaman hayati, dan bahkan telah mengganggu hubungan antar Negara.
9. Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen Kuartar dengan sisipan batuan sedimen Tersier di bagian Barat dan Selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian Barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan. Ditinjau dari potensi-bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian

Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali di sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

10. Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Provinsi Riau. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Pengelolaan tata guna lahan dan tata air diupayakan melalui penyiapan rencana pengelolaan DAS terpadu; penataan permukiman di tepian sungai melalui konsep riverfront development; penataan lokasi pertambangan, industri, dan fasilitas umum; pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; legalisasi dan sosialisasi RT/RW Provinsi dan RT/RW Kabupaten/Kota; reboisasi dan penghijauan; penertiban lokasi logpond; pengendalian kegiatan perladangan berpindah, perambahan hutan, dan illegal logging; pengendalian kebakaran hutan; pembangunan kanal dan prasarana penanggulangan banjir; pelaksanaan pengawasan kawasan perlindungan tata air dan penyediaan prasarana pengamatan tata air; dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
12. Pengendalian pencemaran terhadap badan air diupayakan melalui penataan lokasi sumber-sumber pencemar; pengendalian pencemaran limbah B3; pelaksanaan program land application untuk industri kelapa sawit; pengendalian limbah domestik dan industri melalui pembangunan IPAL; dan membangun sistem informasi lingkungan (SIL) untuk pengendalian pencemaran badan sungai, pesisir, dan laut.
13. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan telah diupayakan melalui pemadaman kebakaran, pembentukan Posko Siaga kebakaran hutan, pengaturan melalui keputusan Gubernur Riau, membangun sistem informasi kebakaran hutan, dan membangun kerja sama internasional melalui pembentukan pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada skala ASEAN.
14. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membangun lingkungan yang lestari diupayakan melalui penegakan hukum dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan; sosialisasi peraturan-perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; sosialisasi program SUPER bagi industri; penanganan sengketa lingkungan di luar pengadilan; dan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL; pengawasan pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan; pembentukan forum dan gerakan masyarakat peduli lingkungan; penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (Propor); pelaksanaan program Adipraja dan Laut Lestari; pengendalian dan penanganan limbah UKM dan rumah tangga; dan pengembangan program kemitraan dalam pemanfaatan dan daur-ulang limbah.
15. Peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup diupayakan melalui penataan dan pengaturan peruntukan sungai; penetapan baku mutu kualitas lingkungan; penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan berfungsi lindung; pengembangan

sarana laboratorium pengujian kualitas lingkungan; pelaksanaan program Bangun Praja; pembinaan PPNS dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah; serta peningkatan peran serta institusi bidang lingkungan hidup daerah dalam perencanaan penataan ruang dan pembangunan daerah.

16. Lingkungan hidup yang lestari telah menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh, termasuk yang dilaksanakan oleh Provinsi Riau. Untuk itu, perlu diperkuat kesiapan Provinsi Riau dalam menghadapi perkembangan global di bidang lingkungan hidup yang antara lain terwujud sebagai trade barrier, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan sebagainya. Di samping itu, sebagai daerah yang berdekatan dengan Negara lain, juga dituntut kesiapan Provinsi Riau dalam pengendalian kerusakan lingkungan yang berpotensi mengganggu hubungan antar negara, seperti pengendalian kebakaran hutan. Provinsi Riau juga dituntut berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan wilayahnya yang memiliki hutan yang luas, perkembangan kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan pencemar gas rumah kaca, dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut yang mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perubahan pola iklim yang memberikan dampak secara langsung terhadap aktivitas masyarakat di Provinsi Riau. Pada skala nasional Provinsi Riau juga dihadapkan pada tantangan untuk dapat mencapai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program nasional, seperti Bangun Praja, Proper, Laut Lestari, dan sebagainya.
17. Dalam jangka panjang, pembangunan dan perkuatan kelembagaan dan aparatur yang membidangi lingkungan hidup; pengembangan prana dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan standar dan tata cara yang berlaku secara global akan menempatkan Provinsi Riau sebagai pelestari dan penjaga kualitas lingkungan yang terkemuka di Indonesia, diantaranya keterlibatan secara aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Upaya Pelestarian Sumber Daya Genetik Riau

Keberadaan keragaman hayati di Provinsi Riau sampai saat ini masih cukup memadai. Beberapa komoditas telah diidentifikasi dan diyakini memiliki keunggulan sifat genetik yang tidak didapatkan pada varietas lain seperti ketahanan terhadap hama penyakit, produksi cukup tinggi, dan memiliki rasa yang disukai. Pemerintah daerah melalui Dinas / instansi terkait berupaya untuk mengangkat komoditas tersebut untuk dijadikan sebagai komoditas spesifik daerah. Selanjutnya tahap inventarisasi telah dilakukan oleh BPSB. Beberapa komoditas yang telah diinventarisasi adalah padi, jeruk, durian, salak, mangga. Namun demikian mengingat berbagai keterbatasan seperti SDM, identifikasi dan eksplorasi komoditas belum dilakukan (Parlin H. Sinaga, 2004).

Beberapa kabupaten yang telah mengidentifikasi dan mengkarakterisasi potensi plasma nutfah daerahnya antara lain : 1) Kabupaten Pelalawan, 2) Kabupaten Kampar dan 3) Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi plasma nutfah tersebut dihasilkan perkembangan sebagai Tabel 1.

Tabel 1. tindak lanjut hasil inventarisasi plasma nutfah.

Kabupaten	Hasil yang dicapai
Pelalawan	Pengembangan Kebun Plasma Nutfah di bawah UPTD Plasma Nutfah yakni pengembangan dan pelestarian tanaman buah lokal langka dan juga termasuk tanaman unggul nasional yang berkembang dan dibudidayakan di Kabupaten Pelalawan. Saat ini sudah terdapat lebih kurang 60 (enam puluh) jenis tanaman langka khas Pelalawan yang dikembangkan namun masih pada tahap pengembangan alias belum menghasilkan buah. Pengembangan persilangan galur varietas Cekow dan Karya Pelalawan.
Kampar	Dibenhinya kawasan Stanum sebagai objek agrowisata berwawasan ilmiah.
Rokan Hulu	Dirancang grand design dan DED pembangunan UPTD Penelitian terpadu di Kabupaten Rokan Hulu.

KESIMPULAN

1. Kegiatan pelestarian Sumber Daya Genetik di Provinsi Riau tidak lepas dari usaha pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing dan mewujudkan lingkungan yang lestari.
2. Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Provinsi Riau. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

Saran

Upaya pelestarian Sumber Daya Genetik yang diawali dengan kegiatan inventarisasi plasma nutfah daerah hendaknya dilaksanakan oleh seluruh kabupaten di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, J. 1999. Aseptabilitas Teknologi Pertanian Bagi Konsumen dalam Tonggak Kemajuan Teknologi Produksi Tanaman Pangan Konsep dan Strategi Peningkatan Produksi Pangan. Simposium Penelitian Tanaman Pangan IV. Bogor 22-24 November 1999. Puslitbang Tanaman Pangan. Badan Litbang Pertanian. Hal. 12-23.
- Parlin, H. Sinaga, 2004. Kekayaan Keragaman Hayati di Provinsi Riau. Disampaikan pada Seminar Nasional Plasma Nutfah 4-5 Agustus 2004 di Bogor.
- Pemerintah Provinsi Riau, 2009. Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025.